

KINERJA INDUSTRI MANUFAKTUR DI PROVINSI-PROVINSI SUMATERA TAHUN 2010-2015

(Manufacturing Industry Performance in Sumatera Provinces 2010-2015)

Juli Panglima Saragih

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
e-mail: julipsaragih@gmail.com & juli.saragih@dpr.go.id

Naskah diterima: 08 April 2017
Naskah direview: 20 April 2017
Naskah diterbitkan: 31 Desember 2018

Abstract

Manufacturing industry has given significant contribution to Indonesia's gross domestic product since 2005-2010. Most of manufacturing industry in Sumatera island were mainly represented by agroindustry, and oil and gas industries. This research aims to analyze manufacturing industry performance in Sumatera island in terms of its share in Sumatera GDP and comparing it to total production of national manufacturing industry. This study uses Location Quotient methods to analyse contribution of manufacturing industry on Sumatera GDP. This study finds that Location Quotient of manufacturing industry of Sumatera island is overall less than 1 in period of 2010-2015. It indicates that manufacturing industry in Sumatera gives less significant contribution to overall of GDP of Sumatera. However, in terms of provinces in Sumatera island, the highest shares of manufacturing industry to GDP were in three provinces, namely, North Sumatera, Riau islands, and Riau provinces. Whilst in other provinces in Sumatera, the shares of industry to GDP were moderate and small. This study suggests that to improve the shares of industry in Sumatera island to GDP, the government must diversify its manufacturing industries from natural resource base to other local specific base resources. These findings should be accommodated in future policy to improve the economic growth in Sumatera island in particular and Indonesia in general.

Keywords: *manufacturing industry, Location Quotient, performance of industry sector, gross domestic product, Sumatera Island.*

Abstrak

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Kontribusinya semakin meningkat terhadap PDB selama periode 2005-2010. Industri manufaktur di Pulau Sumatera sebagian besar berbasis perkebunan, sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis kinerja industri manufaktur di Pulau Sumatera dengan menggunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)*. *Estimasi* penghitungan LQ menggunakan data-data industri manufaktur se-Sumatera dalam periode 2010-2015. Dari hasil analisis LQ tersebut diperoleh antara lain bahwa industri manufaktur di Pulau Sumatera periode 2010-2015 memiliki nilai $LQ < 1$. Ini menunjukkan secara agregat industri manufaktur di Pulau Sumatera masih belum dapat diandalkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi (PDB) regional Pulau Sumatera walaupun berkontribusi positif terhadap industri manufaktur nasional. Namun jika berdasarkan LQ provinsi, industri manufaktur tumbuh signifikan hanya terjadi di tiga provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Riau. Sedangkan dua provinsi yakni Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung ditemukan memiliki pertumbuhan moderat. Lima provinsi lainnya mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dalam periode yang sama. Antara pulau di Indonesia, kontribusi industri manufaktur Pulau Sumatera relatif besar setelah Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lain di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah perlunya diversifikasi industri di Pulau Sumatera sesuai potensi sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat struktur industri manufaktur di Pulau Sumatera tersebut. Diversifikasi industri dimaksud tidak hanya industri berbasis perkebunan dan sumber daya alam saja. Kebijakan industri nasional ke depan selayaknya memerhatikan temuan studi ini supaya pertumbuhan industri di Pulau Sumatera semakin optimal.

Kata kunci: industri manufaktur, kinerja sektor industri, Produk Domestik Bruto, Sumatera.

PENDAHULUAN

Industri manufaktur atau industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan peranan terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama periode 1993-2010. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB tahun 2010 mencapai sebesar 27,44 persen (Saimul, dkk., 2011). Namun pada tahun 2012-2014, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012, kontribusinya hanya mencapai 21,46 persen, dan menjadi 20,98 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014, kontribusinya meningkat menjadi 21,02 persen (BPS, 2015). Penurunan

tersebut terus terjadi sampai tahun 2016. Kontribusi industri ini terhadap PDB pada tahun 2016 turun menjadi 19,90 persen dengan komposisi kontribusi 17,82 persen untuk nonmigas dan migas plus batu bara mencapai 2,08 persen terhadap PDB. Penurunan tersebut disebabkan antara lain kecenderungan perekonomian global yang masih melambat (Tempo, 2017). Dalam hal pertumbuhan, tercatat bahwa secara nasional, industri manufaktur periode tahun 2012-2016 masing-masing tumbuh 5,62 persen; 5,23 persen; 4,63 persen; 5,04 persen; 4,29 persen. Pada tahun 2017, sektor industri manufaktur diprediksi tumbuh 5,4 persen dan tahun 2018 sebesar 5,6 persen (Kemenperin, 2017).

Berdasarkan pulau, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Pulau Sumatera pada tahun 2012-2015 memberikan sumbangan masing-masing sebesar 23,10 persen; 23,08 persen; 22,71 persen; dan 22,21 persen terhadap PDB nasional. Sementara itu, tahun 2015 Pulau Jawa menyumbang sebesar 58,29 persen dan diikuti Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen terhadap PDB nasional. Selebihnya disumbang oleh Pulau Sulawesi, Provinsi Papua, dan Papua Barat, dan wilayah-wilayah lain. Tahun 2016 lalu Pulau Jawa dan Sumatera masih mendominasi perekonomian nasional yakni masing-masing berkontribusi 58,49 persen dan 22,03 persen. Selebihnya Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain. Data ini menggambarkan bahwa Pulau Sumatera memberikan peran besar dalam perekonomian Indonesia sejak 1990-an (BPS, 2016 dan 2017). Diantara berbagai sektor-sektor ekonomi di Pulau Sumatera, peran sektor industri manufaktur lebih dominan, diikuti oleh pertanian, perkebunan, dan kelautan/perikanan, serta sektor lainnya. Dalam sektor industri manufaktur, Industri pengolahan SDA, dan hasil perkebunan memiliki kontribusi terbesar. Hal ini sesuai potensi SDA dan pertanian yang dimiliki Pulau Sumatera. Kinerja industri manufaktur Pulau Sumatera tersebut tentu menarik untuk dikaji perkembangan kinerjanya, karena kontribusi ekonomi Pulau Sumatera terhadap perekonomian menempati urutan kedua terbesar setelah Pulau Jawa. Oleh karena itu baik buruknya kinerja industri Sumatera berimplikasi langsung terhadap perekonomian nasional, termasuk untuk tujuan ekspor.

Pembangunan industri manufaktur di luar Pulau Jawa khususnya Pulau Sumatera membutuhkan kebijakan lintas-sektor karena bersifat multi-dimensi. Perluasan industri ke luar Pulau Jawa juga harus didukung oleh infrastruktur yang memadai dan *supply* bahan baku termasuk ketersediaan gas bumi untuk industri yang berkesinambungan terutama industri pengolahan nonmigas seperti industri-industri pengolahan berbasis perkebunan (*agro industry*), serta industri pengolahan hasil tambang migas dan nonmigas. Sampai saat ini, Pulau Sumatera masih memiliki potensi sumber daya alam migas dan nonmigas untuk dikembangkan dan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui pengembangan industri hilir, selain potensi perkebunan.

Jika dilihat peta industri manufaktur dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, hanya 5 provinsi dengan industri manufaktur yang cukup maju sejak sepuluh tahun terakhir. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan industri baik hulu maupun hilir di Sumatera butuh lahan yang cukup luas agar menjadi suatu kawasan industri (*industrial*

zone). Saat ini, relatif sedikit kawasan industri yang dibangun di Pulau Sumatera. Beberapa kawasan industri yang direncanakan dibangun di Pulau Sumatera antara lain: kawasan industri manufaktur di Pulau Bangka (Provinsi Bangka Belitung), Tanjung Buton (Provinsi Riau), dan Tanggamus (Provinsi Lampung). Pulau Batam merupakan contoh kawasan industri yang baik dengan manajemen khusus di bawah kendali Badan Otorita Batam. Di samping itu, pengembangan industri manufaktur juga butuh kebijakan yang protektif dari pemerintah sebagai awal pembangunan industri (*start-up industry*). Oleh karena itu baik pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dan bersinergi agar pertumbuhan industri manufaktur di daerah berkembang pesat seperti industri di Pulau Jawa.

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini terdiri dari dua hal, *pertama*, bagaimana strategi dan kebijakan industri nasional¹; *kedua*, bagaimana kinerja industri manufaktur di Pulau Sumatera. Pentingnya kedua masalah di atas dikaji untuk melakukan perbaikan ke depan dalam rumusan strategi dan kebijakan industri manufaktur nasional umumnya dan kebijakan industri manufaktur di Pulau Sumatera khususnya. Namun sebelum hal tersebut dibahas, berikut diungkapkan metode analisis yang digunakan dalam mendiskusikan kedua masalah tersebut.

METODE ANALISIS

Penelitian ini menganalisis kinerja riil industri manufaktur di Pulau Sumatera dalam lima tahun terakhir sejak 2010-2015 dengan menggunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)*. Metode ini bertujuan untuk melihat potensi industri manufaktur di Pulau Sumatera dibandingkan dengan industri manufaktur secara nasional. Melalui metode analisis ini diharapkan dapat dilihat apakah kontribusi industri manufaktur di Pulau Sumatera cukup signifikan terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan apakah industri manufaktur di Pulau Sumatera juga berkontribusi terhadap industri manufaktur secara nasional.

Metode LQ merupakan metode analisis untuk mengetahui atau mengukur potensi riil suatu industri atau sektor ekonomi di suatu wilayah/daerah terhadap keseluruhan industri atau perekonomian nasional (Ahmad Ma'ruf, 2012). Adapun besaran dan makna nilai LQ dimaksud adalah sebagai berikut:

¹ Kebijakan industri nasional didasarkan pada dan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI.

- (1) $LQ = 1$ artinya peranan suatu sektor di suatu wilayah analisis sama dengan peranannya di tingkat nasional.
- (2) $LQ > 1$ artinya peranan suatu sektor di suatu wilayah analisis lebih besar dibandingkan dengan peranannya di tingkat nasional.
- (3) $LQ < 1$ artinya peranan suatu sektor di suatu wilayah analisis lebih kecil dibandingkan dengan peranannya di tingkat nasional.

Sedangkan formula LQ untuk industri manufaktur di masing-masing provinsi dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$LQ_{ijt} = \frac{(x_i^j / x^{*jt})}{(x_i^* / x^{**t})}$$

di mana:

- LQ_{ijt} = nilai LQ industri manufaktur provinsi (j) tahun (t);
- x_i^j = produksi industri manufaktur provinsi (j) tahun (t);
- x^{*j} = PDRB provinsi (j) tahun (t);
- x_i^* = produksi industri manufaktur nasional tahun (t);
- x^{**} = nilai PDB nasional tahun (t).

Formula di atas dapat juga diartikan bahwa, nilai kontribusi industri manufaktur suatu provinsi terhadap nilai total PDRB provinsi tersebut, dibagi dengan nilai kontribusi industri manufaktur nasional terhadap nilai total PDB nasional. Analisis LQ sesuai dengan rumusnya memang relatif sederhana, akan tetapi analisis LQ juga penting dan dapat dibuat menarik dan bermanfaat apabila dilakukan dalam bentuk time-series. Artinya data yang dianalisis adalah beberapa kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, perkembangan LQ bisa dilihat untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal itu dapat membantu untuk melihat kekuatan atau kelemahan terhadap wilayah atau sektor (individu) yang dianalisis (Amin, AA, 2015).

Menurut Savitri, D. (2008) metode LQ berfungsi untuk mengukur spesialisasi relatif dari suatu wilayah/daerah dalam industri tertentu. Metode LQ juga dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas ekspor yang dimiliki oleh daerah. Artinya dengan menggunakan metode ini, perencana dapat mengetahui spesialisasi yang dimiliki oleh daerah dibandingkan dengan daerah yang tingkatannya

lebih tinggi atau sektor lain yang memiliki kategori yang sama. Menggunakan metode LQ adalah sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang. Sedangkan bagi sektor baru atau sedang tumbuh dan belum pernah ada, maka LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Analisis LQ dapat dilakukan dalam beberapa periode atau kurun waktu tertentu. Pada keadaan ini, perkembangan LQ diamati untuk sektor tertentu pada kurun waktu tertentu yang berbeda guna mengetahui apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal ini menarik untuk diamati lebih lanjut, misalnya apabila nilai LQ naik maka dikaji faktor-faktor yang membuat suatu daerah atau sektor tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Jika terjadi penurunan, maka dikaji faktor-faktor apa yang menyebabkan pertumbuhan lebih lambat dari rata-rata nasional (Savitri, D., 2008). Dalam uraian selanjutnya akan dibahas bagaimana perkembangan kinerja industri manufaktur Pulau Sumatera dengan menggunakan metode LQ di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri manufaktur baik migas dan nonmigas telah menggeser peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia sejak dua dekade terakhir periode 2005-2015. Namun kemajuan industri manufaktur tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dan kemajuan sektor pertanian karena sebagian industri manufaktur adalah berbasis komoditas pertanian (perkebunan dan perikanan) termasuk industri manufaktur di Pulau Sumatera (Tabel 1). Kontribusi industri manufaktur sudah mendominasi dalam PDB sejak 2005. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor industri dalam mendukung perekonomian nasional.

Penelitian yang dilakukan Kustanto, H., dkk (2012), misalnya menyimpulkan bahwa dibutuhkan waktu minimal 8 tahun agar pangsa *output* sektor industri manufaktur meningkat dari 25,76 persen per tahun terhadap PDB tahun 2010 (Tabel 1) menjadi 35 persen terhadap PDB pada tahun 2020, dengan asumsi bahwa pertumbuhan industri manufaktur rata-rata harus mencapai 12 persen per tahun (2010-2020) dan pertumbuhan PDB nasional minimal 6 persen per tahun (2010-2020). Sedangkan jika industri manufaktur tumbuh rata-rata hanya 8 persen per tahun maka dibutuhkan waktu sekitar 24 tahun untuk mencapai pangsa *output* industri manufaktur terhadap PDB sebesar 35 persen.

Strategi dan Kebijakan Industri Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan pembangunan industri nasional adalah fokus pada pengembangan perwilayahan industri melalui strategi membangun 14 Kawasan Industri (KI) di luar Pulau Jawa dan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM). Kebijakan lain adalah: (1) menambah populasi industri manufaktur dengan target 9.000 industri berskala besar dan sedang di mana 50 persen berada di luar Pulau Jawa; (2) tumbuhnya 20.000 unit usaha industri kecil di seluruh Indonesia; dan (3) peningkatan daya saing dan produktivitas industri melalui peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja atau produktivitas tenaga kerja industri (Kemenperin, 2017).

Menurut data Kementerian Perindustrian, sampai saat ini, kawasan industri di seluruh Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya di Jabodetabek (Kemenperin, 2017). Pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa terbentur pada persoalan lahan yang semakin mahal. Sebab lahan yang cukup luas sangat dibutuhkan dalam membangun industri-industri baru di luar Pulau Jawa. Saat ini hanya beberapa kawasan industri di Pulau Sumatera yang berkembang seperti di Pulau Batam dan Kota Medan. Karakteristik kawasan industri berbeda dibandingkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Sedangkan perkiraan kebutuhan tenaga kerja yang diserap suatu kawasan industri dapat pula dilakukan dengan pendekatan luasan area kawasan industri tersebut. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri menjelaskan bahwa tiap satu hektar (ha) kawasan industri dapat menyerap 100 tenaga kerja langsung. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa pengembangan 14 kawasan industri dapat menyerap lebih dari 900.000 tenaga kerja. Di samping itu, peran kawasan industri terhadap pertumbuhan sektor industri nasional selama ini cukup signifikan, karena mampu berkontribusi 40 persen dari nilai total ekspor nonmigas dan menarik investasi sekitar 60 persen dari total investasi sektor industri. Menurut data Kementerian Perindustrian, hingga saat ini, jumlah kawasan industri di Indonesia sebanyak 74 kawasan industri dengan total luas lahan mencapai sekitar 30.000 ha. Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035, pemerintah ditargetkan akan membangun minimal 36 kawasan industri baru dengan penambahan luas minimal 50.000 ha. Sedangkan untuk periode 2015-2019, Kementerian Perindustrian memfasilitasi pembangunan 14 kawasan industri di luar Pulau

Jawa dengan perincian 7 kawasan industri di Wilayah Indonesia Timur dan sisanya di Wilayah Indonesia Barat. Kawasan industri di Pulau Jawa akan diarahkan pada pengembangan jenis industri tertentu. Sedangkan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral, dan pertanian (perkebunan) seperti di Pulau Sumatera dan Kalimantan (Kemenperin, 2017).

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Perindustrian RI tahun 2016, telah direncanakan pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa yakni: (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra industri kecil dan menengah (IKM). Strategi pengembangan perwilayahan industri tersebut adalah: a) Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (i) Bintuni-Papua Barat; (ii) Bul-Halmahera Timur Maluku Utara; (iii) Bitung-Sulawesi Utara, (iv) Palu-Sulawesi Tengah; (v) Morowali-Sulawesi Tengah; (vi) Konawe-Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng-Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin-Kalimantan Selatan; (ix) Jorong-Kalimantan Selatan; (x) Ketapang-Kalimantan Barat; (xi) Landak-Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung-Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke-Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Provinsi Lampung; b) Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa; c) Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia: Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, NTB, dan NTT, dan 11 di Kawasan Barat Indonesia; d) Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik, infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan) atau *Quality Working Life* bagi pekerja (Kemenperin, 2017).

Dalam Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa industri manufaktur nonmigas berkontribusi rata-rata 18 persen terhadap total PDB per tahun periode 2010-2015. Pemerintah memproyeksikan kontribusinya tahun 2017 meningkat minimal 20 persen terhadap PDB. Tetapi apabila digabung dengan industri migas maka *share*-nya sudah mencapai 20 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan industri manufaktur Sumatera terhadap PDB Sumatera, maka kontribusinya juga cenderung meningkat.

Kinerja industri manufaktur tahun 2015 mencapai Rp2.097,71 triliun atau berkontribusi 20,51 persen dari PDB nasional, dengan kontribusi terbesar adalah industri makanan dan minuman, barang logam, alat angkutan serta industri kimia, farmasi,

Tabel 1. Kontribusi Sektor Industri Manufaktur dan Sektor Lainnya terhadap PDB Nasional (1971-2015), Dalam (%)

No.	Sektor	1971	1980	1990	2005	2009	2010	2015
1.	Pertanian	44,83	30,7	19,42	14,54	13,61	13,17	13,45
2.	Pertambangan & Penggalian	8,01	9,3	15,19	9,30	8,27	8,07	7,21
3.	Industri Manufaktur	8,36	15,3	19,35	28,10	26,16	25,76	20,51
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,49	0,7	0,63	0,66	0,78	0,78	1,22
5.	Bangunan/Konstruksi	3,49	5,7	5,80	5,91	6,44	6,50	10,38
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	16,11	16,6	16,13	16,83	16,90	17,34	13,19
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,41	5,4	5,53	6,26	8,80	9,41	11,76
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan	12,2	13,8	14,49	9,26	9,59	9,55	5,93
9.	Jasa-Jasa Lain	2,11	2,8	3,46	9,14	9,43	9,43	11,72
	Total	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id.

dan obat tradisional. Pencapaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014 senilai Rp1.884 triliun atau memberikan kontribusi 17,8 persen terhadap PDB nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian mengatakan kenaikan porsi tersebut disebabkan turunnya kontribusi beberapa sektor lain seperti minyak dan gas (migas), komoditas perkebunan, pertambangan nonmigas. Industri pengolahan secara umum berkontribusi 20,84 persen atau mencapai Rp2.405,4 triliun dari PDB nasional senilai Rp11.540,79 triliun (Kemenperin, 2017).

Adapun sasaran kualitatif pembangunan industri nasional 2015-2019 adalah: 1) Meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas hingga mencapai 8,4 persen pada tahun 2019; 2) Meningkatkan peran atau kontribusi industri pengolahan nonmigas dalam perekonomian (PDB) 19,4 persen tahun 2019; 3) Mengurangi ketergantungan terhadap impor; 4) Meningkatkan ekspor produk industri; 5) Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri; 6)

Meningkatkan peran industri kecil dan menengah (IKM); 7) Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi; 8) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia (TKI); 9) Memperkuat struktur industri; 10) Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA); 11) Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional (Kemenperin, 2017).

Untuk mencapai sasaran kualitatif di atas, Kementerian Perindustrian RI juga telah membuat sasaran kuantitatif hingga tahun 2019 (Tabel 2).

Sedangkan dalam mencapai sasaran kualitatif dan kuantitatif di atas, Kementerian Perindustrian RI telah menetapkan industri prioritas untuk dikembangkan dalam jangka panjang 2015-2035 di seluruh Indonesia yakni:

- 1) Industri pangan (industri makanan dan minuman, industri pengolahan ikan, pengolahan susu, bahan penyegar, pengolahan minyak nabati, pengolahan buah-buahan dan sayuran, tepung, dan Industri gula berbasis tebu);
- 2) Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;

Tabel 2. Indikator Kuantitatif Pembangunan Industri Nasional, (2015-2019)

No.	Indikator Kuantitatif Pembangunan Industri Nasional	2015	2016	2017	2018	2019
1)	Pertumbuhan industri pengolahan tanpa migas	5,04%	5,7%	6,5%	7,4%	8,4%
2)	Kontribusi industri pengolahan tanpa migas terhadap PDB	18,18%	18,5%	18,7%	19,1%	19,4%
3)	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	70,98%	67,8%	68,3%	68,8%	69,3%
4)	Persentase tenaga kerja industri terhadap Tenaga kerja nasional	-	14,4%	14,7%	15,0%	15,4%
5)	Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri	-	39,4%	36,1%	32,8%	29,8%
6)	Persentase nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa	27,73%	28,1%	28,4%	28,8%	29,4%
7)	Nilai investasi sektor industri (RpTriliun)	236,04	305,00	346,00	393,00	448,00
8)	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (juta orang)	-	16,00	16,60	17,20	17,80

Sumber: Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian RI, www.kemenperin.go.id.

- 3) Industri tekstil, kulit, alas kaki, aneka industri tekstil (*garment*), furnitur dan barang lainnya dari kayu, plastik, pengolahan karet, dan barang dari karet;
- 4) Industri alat transportasi (industri kendaraan bermotor, kereta api, perkapalan dan kedirgantaraan/pesawat udara);
- 5) Industri elektronika dan telematika, (industri elektronika, komputer dan peralatan komunikasi);
- 6) Industri pembangkit energi dan Industri alat-alat listrik dan ketenagalistrikan;
- 7) Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan Jasa industri industri mesin dan perlengkapan, komponen, bahan penolong; Industri hulu agro industri *oleo-food*, *oleo-chemical*, pakan ternak, barang dari kayu, *pulp* dan kertas;
- 8) Industri logam dasar, bahan galian bukan logam, Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar, Industri pengolahan dan pemurnian logam dasar bukan besi, logam mulia, tanah jarang (*rare earth*), bahan bakar nuklir, dan bahan galian non-logam;
- 9) Industri kimia dasar berbasis SDA dan non-SDA (industri pengolahan migas, batubara, petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, resin sintetik, bahan plastik, karet alam, karet sintetik, dan barang kimia lainnya).

Industri prioritas di atas, hendaknya dikembangkan secara merata di luar Pulau Jawa sehingga akan terjadi distribusi pendapatan masyarakat ke luar Pulau Jawa. Perkembangan industri nasional di Indonesia yang mengalami pasang surut sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 1998 juga menjadi penting untuk merumuskan strategi kebijakan yang mampu mendorong peranan sektor industri dalam pembentukan PDB. Reindustrialisasi merupakan konsep untuk menggerakkan industri domestik yang dimulai pada tahun 2008. Reindustrialisasi tersebut fokus pada perubahan yang komprehensif dan holistik dalam proses mendorong kembali industri manufaktur di Indonesia ke depan (Murtianingsih, 2015).

Apabila dianalisa sebelum dan sesudah krisis global tahun 2008, maka hanya 3 kelompok industri yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional periode 2004-2009 yakni 1) Industri makanan, minuman dan rokok rata-rata 29,22 persen per tahun; 2) Industri pupuk, kimia, plastik, karet, produk petrokimia sebesar 13,54 persen per tahun; dan 3) Industri mesin, peralatan mesin dan alat transportasi sebesar 27,82 persen per tahun. Ketiga kelompok industri di atas jelas pasti mengalami

pertumbuhan tinggi dibandingkan jenis industri lainnya (Yanfitri, YK., 2010). Artinya kinerja industri manufaktur secara keseluruhan berdampak pada PDB secara nasional. Karena perekonomian Indonesia juga bergantung pada ekspor-impor. Apabila impor barang modal dan bahan baku tinggi maka akan memengaruhi kinerja ekspor industri manufaktur termasuk di Pulau Sumatera. Kebijakan industri manufaktur memang bersifat universal berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Pulau Sumatera. Namun pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kepedulian dan dukungan dari berbagai aspek sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Kinerja Industri Manufaktur Sumatera

Distribusi dan kekuatan industri manufaktur di Pulau Sumatera relatif tidak merata. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar berada dan terfokus di lima provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung (Gambar 1 dan 2). Karakteristik industri manufaktur di setiap provinsi di Pulau Sumatera juga berbeda-beda sesuai dengan potensi SDA dan sumber daya manusia (SDM) masing-masing. Industri manufaktur di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagian besar berbasis perkebunan. Industri manufaktur di Provinsi Riau sebagian besar berbasis perkebunan dan sumber daya alam migas.

Sementara industri manufaktur di Provinsi Kepulauan Riau relatif beragam dan hampir tidak ada yang dominan terutama dapat dilihat di kawasan industri Pulau Batam yang sebagian besar industrinya berorientasi ekspor. Industri manufaktur di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh industri berbasis perkebunan, migas, dan nonmigas. Industri manufaktur di Provinsi Riau adalah berbasis perkebunan dan migas. Sedangkan industri manufaktur di Provinsi Lampung sebagian besar juga berbasis perkebunan.

Jika melihat Gambar 1, maka industri manufaktur di Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung sangat sulit untuk dikembangkan, karena dari sisi geografis, SDM, SDA, dan kemajuan teknologi tidak mendukung termasuk sarana dan prasarana industri yang belum memadai seperti *supply* energi listrik dan gas bumi. Industri manufaktur di kedua provinsi ini sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan 5 provinsi di Pulau Sumatera. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah lebih fokus pada 5 provinsi di Pulau Sumatera yang industri manufakturnya sudah berkembang dan maju. Pasar Sumatera masih merupakan pasar potensial bagi produk industrinya dan masih prospektif karena jumlah penduduknya adalah terbesar kedua setelah Pulau Jawa. Potensi pasar tersebut

perlu dimanfaatkan dan dijaga. Sedangkan dari sisi geografi, relatif dekat distribusinya dibandingkan dengan distribusi produk industri manufaktur dari Pulau Jawa.

Salah satu solusinya adalah bahwa ketiga provinsi tersebut harus fokus pada keunggulan daerah masing-masing tanpa harus mengembangkan industri manufaktur yang memang tidak efisien dan tidak adanya jaminan *supply* bahan baku yang cukup. Apabila memang sulit untuk mengembangkan sektor industri manufaktur maka dapat memilih mengembangkan sektor di luar sektor industri, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan lain-lain melalui peningkatan investasi baik domestik maupun asing.

Tanpa peningkatan investasi pada industri manufaktur di ketiga provinsi yang relatif tertinggal tidak mungkin ada penambahan produksi *output* sehingga skala ekonomi industri manufaktur tidak meningkat dan patut diduga tidak akan menutupi biaya produksi yang saat ini cenderung meningkat. Hal inilah yang menjadi tantangan tidak hanya bagi tiga provinsi tersebut tetapi juga terhadap provinsi lain yang industri manufakturnya kurang maju serta industri manufaktur di Pulau Sumatera secara keseluruhan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB relatif rendah hanya 11 persen dan berada di bawah rata-rata Pulau Sumatera. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2006 sebesar 12,9 persen, tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 12,8 persen, tahun 2009 turun menjadi 12,7 persen, tahun 2010 turun pada angka 12,3 persen, Selanjutnya, pada 2011 menjadi 12,1 persen, 2012 turun menjadi 11,9 persen, 2013 pada posisi 11,7 persen dan terakhir pada 2014 pada angka 11,5 persen. Tahun 2016 pertumbuhannya tercatat sebesar 7,20 persen dari tahun 2015 yang didominasi oleh industri sedang dan besar (Antara, 2017).

Sebagaimana disebutkan di atas, hanya 5 provinsi yang industri manufakturnya relatif maju dan berkembang. Lima provinsi lain seperti Aceh berkontribusi hanya 3,4 persen di tahun 2010, Sumatera Barat 3,8 persen, Jambi 3,9 persen, Bengkulu 0,6 persen, dan Bangka Belitung 2,1 persen terhadap total Pulau Sumatera. Pada tahun 2015, kontribusi kelima provinsi tersebut juga masih rendah sehingga berpengaruh terhadap perekonomian daerah masing-masing. Industri manufaktur di Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung sangat tidak berkembang sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2, dan jika dibandingkan dengan kontribusi dari Provinsi Kepulauan Riau

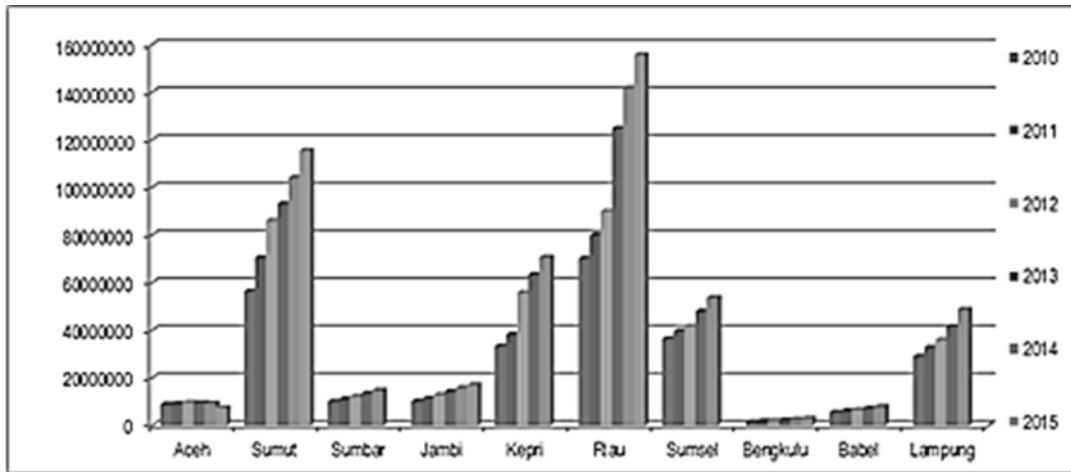
sebesar 12,7 persen, Sumatera Utara sebesar 21,5 persen dan Riau sebesar 26,7 persen. Artinya industri manufaktur di ketiga provinsi tersebut secara tidak langsung memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap industri manufaktur nasional mewakili Pulau Sumatera secara keseluruhan (Gambar 2).

Data statistik menunjukkan industri manufaktur (sedang dan besar) di Provinsi Riau tahun 2015 tumbuh 2,41 persen. Pada triwulan I/2015 tumbuh -9,66 persen. Tetapi pada pada triwulan II/2015 tumbuh positif sebesar 0,72 persen, triwulan II/2015 tumbuh sebesar 3,98 persen, dan triwulan IV/2015 tumbuh sebesar 14,60 persen. Kemudian pada tahun 2014 tumbuh sebesar 4,04 persen. Sedangkan periode Januari-Juni 2016 kinerja industri manufaktur Provinsi Riau tumbuh sebesar 16 persen (Diskominfo Riau, 2017).

Melihat kondisi sebagaimana dalam Gambar 1, maka Provinsi Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Barat perlu memfokuskan industrinya pada salah satu sektor unggulan yang dipilihnya. Inilah yang akan membuat kelima provinsi tersebut memiliki industri manufaktur yang berdaya saing tinggi ke depan karena sesuai dengan keunggulan dan potensi sumber daya yang dimiliki (*comparative advantage*). Sampai saat ini, Provinsi Aceh belum memiliki industri pengolahan ikan tangkap di hilir padahal potensi kelautan Provinsi Aceh cukup besar (Habadaily, 2017).

Sedangkan Provinsi Aceh juga memiliki infrastruktur berjumlah 6 pelabuhan laut dan paling banyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Selain itu, akses pelabuhan udara yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah pelabuhan laut (Bisnisaceh, 2017). Tidak ada pilihan lain maka Provinsi Aceh ke depan harus mengembangkan industri dengan dukungan sumber daya yang dimiliki seperti industri agro atau industri berbasis sumber daya laut.

Pilihan industri untuk dikembangkan di suatu daerah sangat penting agar tidak mudah terjadi deindustrialisasi ke depan. Oleh karena itu sumber bahan baku, *value chain*, potensi pasar, produktivitas tenaga kerja, efisiensi biaya produksi merupakan hal yang mutlak tidak hanya pengembangan industri di Provinsi Aceh tetapi seluruh industri manufaktur di Pulau Sumatera. Pertumbuhan sub-sektor industri agro dalam struktur industri di Indonesia memegang peranan sangat penting, karena peningkatan *output* industri agro akan mendorong pertumbuhan sektor industri secara umum yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB (Kustanto, H., dkk, 2012, 106).



Sumber: Diolah dari BPS Jakarta.

Gambar 1. Perkembangan Industri Manufaktur 10 Provinsi di Sumatera, 2010-2015 (RpJuta)

Dari hasil perhitungan secara agregat nilai *Location Quotient (LQ)* industri manufaktur Pulau Sumatera dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 nilai $LQ_i^s = 0,77$; (2011): $LQ_i^s = 0,77$; (2012): $LQ_i^s = 0,81$; (2013): $LQ_i^s = 0,90$ dan (2014): $LQ_i^s = 0,90$ (Tabel 1). Artinya sejak tahun 2010 posisi dan kapasitas industri manufaktur Pulau Sumatera masih di bawah atau lebih kecil dari 1. Hal ini mengindikasikan dan menjelaskan industri manufaktur di Pulau Sumatera secara agregat relatif belum dikembangkan secara optimal. Artinya industri manufaktur di Pulau Sumatera belum terkonsentrasi dan belum mendominasi dalam perekonomian nasional dan terhadap industri nasional secara keseluruhan. Apabila dihitung seluruh Indonesia, maka Pulau Jawa pasti menyumbang terbesar terhadap industri nasional yang jika dihitung akan menghasilkan nilai LQ di Pulau Jawa lebih besar dari 1.

Dari Gambar 2 di bawah dapat dijelaskan bahwa satu-satunya nilai LQ industri manufaktur terbesar di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau lebih besar dari 1 ($LQ > 1$). Hal ini simetris dengan pertumbuhan industri manufaktur yang signifikan sebagaimana dijelaskan Gambar 1. Sejak 2010-2015 industri manufaktur di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Pulau Batam tumbuh pesat karena didukung oleh berbagai infrastruktur seperti Kawasan Industri Batam dan perkembangan perekonomian di Pulau Bintan sebagai dampak positif dari kemajuan industri di Pulau Batam. Demikian juga dengan kontribusinya terhadap industri se-Pulau Sumatera tahun 2015 mencapai 15 persen, setelah Provinsi Riau yang mencapai 30 persen, dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 23 persen.

Fenomena di Provinsi Riau juga menarik untuk dikaji. Sedangkan dalam Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan industri manufaktur di Provinsi Riau sangat pesat selama tahun 2010-2015. Hal ini juga

simetris dengan nilai LQ yang telah mencapai lebih dari 1 pada tahun 2015. Nilai rata-rata LQ industri manufaktur Provinsi Riau mencapai 0,90 untuk periode 2010-2015 (Tabel 3). Hal ini menggambarkan industri manufaktur Provinsi Riau berkontribusi besar terhadap PDRB, demikian juga dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi di Provinsi Sumatera Selatan sama dengan fenomena di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Walaupun nilai LQ industri manufaktur di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2015 rata-rata mencapai 0,81 per tahun di bawah 1. Tetapi pertumbuhan pada periode 2010-2014 cukup signifikan (Gambar 1). Periode 2001-2007 pertumbuhan industri manufaktur Provinsi Sumatera Selatan sangat fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2007 sebesar 33,18 persen, sedangkan pertumbuhan terendah sebesar 0,14 persen tahun 2001. Secara rata-rata tumbuh 7,78 persen per tahun periode 2001-2007 (Anton Trianto: 2017,2).

Demikian juga dengan perkembangan industri manufaktur di Provinsi Lampung dengan pertumbuhan tinggi periode 2010-2015. Hal ini juga simetris dengan Gambar 3 dengan nilai LQ yang mendekati angka 1 atau rata-rata mencapai nilai 0,92 per tahun. Letak geografi Provinsi Lampung yang relatif dekat dengan Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Jawa memberikan peluang baik bagi perekonomian Lampung serta perkembangan industrinya.

Demikian juga dengan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan di atas dan dapat dilihat dalam Gambar 1. Periode 2012-2015 nilai rata-rata LQ industri manufaktur Provinsi Sumatera Utara adalah 0,95 (Tabel 2). Nilai LQ ini meningkat dari tahun 2010 dan 2011 (Gambar 2). Fenomena ini juga sama dengan 4 provinsi sebelumnya dengan pertumbuhan industrinya yang tinggi. Pertumbuhan industri di suatu wilayah atau provinsi juga dapat

Tabel 3. Nilai *Location Quotient* Industri Manufaktur Provinsi di Pulau Sumatera (2010-2015)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata (2010-2015)
Aceh	0,40	0,36	0,38	0,38	0,33	0,28	0,29
Sumut	0,77	0,85	0,98	0,94	0,95	0,96	0,90
Sumbar	0,44	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43
Jambi	0,52	0,50	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52
Kep.Riau	1,36	1,37	1,83	1,85	1,85	1,83	1,68
Riau	0,82	0,75	0,77	0,97	0,99	1,13	0,88
Sumsel	0,85	0,80	0,78	0,81	0,83	0,85	0,82
Bengkulu	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,29	0,28
BaBel	0,72	0,70	0,70	0,70	0,68	0,81	0,72
Lampung	0,88	0,87	0,91	0,97	1,00	0,93	0,93

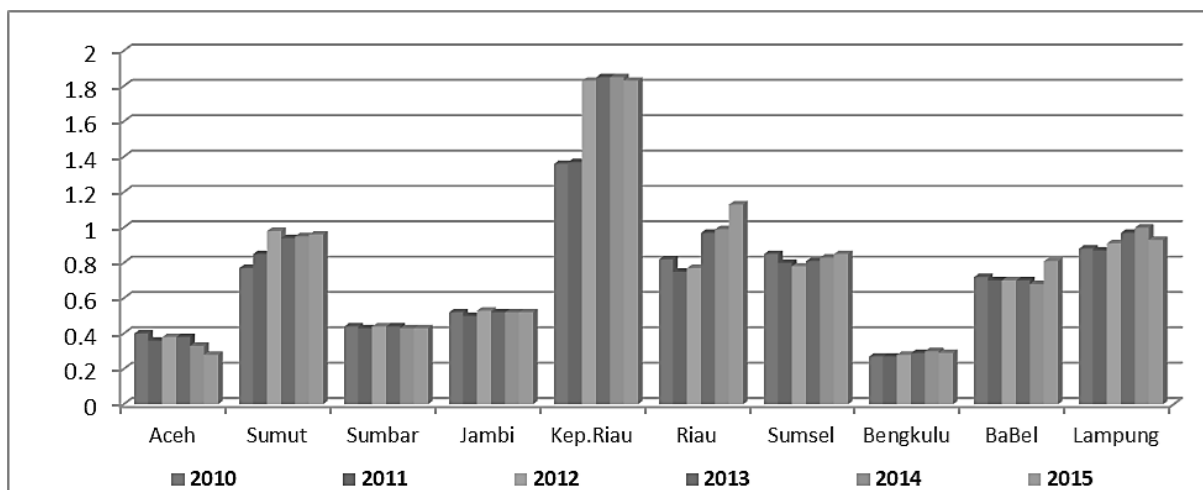
Sumber: Diolah dari BPS Masing-Masing Provinsi.

dipengaruhi oleh berbagai infrastruktur yang dimiliki dan potensi sumber alamnya.

Sedangkan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu merupakan 4 daerah dengan nilai LQ industri manufaktur yang relatif rendah dan dengan pertumbuhan yang lambat. Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu merupakan 3 provinsi dengan nilai LQ yang bersifat *flat* atau merata setiap tahun serta tidak mencapai angka 0,5 (Gambar 2). Bahkan fenomena Provinsi Aceh menunjukkan industri manufakturnya mengalami penurunan pertumbuhan yakni pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini juga dijelaskan dengan nilai LQ yang turun pada tahun 2014 dan 2015 dan tidak mencapai angka 0,5 (Gambar 2). Bila kontribusi industri manufaktur provinsi lain meningkat terhadap industri nasional, justru kontribusi industri manufaktur Provinsi Aceh turun periode 2010-2015 (Gambar 2).

Apabila dianalisis kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Pulau Sumatera, maka kontribusinya tahun 2010 sebesar 17 persen; tahun 2011 sebesar 17 persen; tahun 2012 sebesar 17 persen; tahun 2013 sebesar 29 persen dan 2014 sebesar 19 persen. Secara rata-rata periode 2010-2014 terlihat bahwa *share* tersebut sebesar 18 persen terhadap total PDB Pulau Sumatera. Sedangkan secara nasional kontribusi total industri manufaktur telah mencapai angka di atas 20 persen terhadap PDB nasional. Pada 2016, industri manufaktur masih mendominasi dalam total PDB nasional mencapai 19,90 persen.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat empat sub-sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB khususnya pada sektor industri nonmigas yaitu: 1) industri makanan dan minuman sebesar 33,61 persen; 2) industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 10,68 persen; 3) industri



Sumber: Diolah dari data BPS Provinsi di Sumatera.

Gambar 2. Nilai *Location Quotient* (LQ) Industri Manufaktur Provinsi di Sumatera, (2010-2015)

alat angkutan/transportasi sebesar 10,35 persen; 4) industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 10,05 persen. Selebihnya disumbang sub-sektor industri manufaktur lainnya (Ekonomy.okezone, 2017).

Tabel 4. Kontribusi Industri Manufaktur di Jawa dan Luar Jawa Terhadap PDB Nasional (2011-2015) (%)

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015
Jawa	73,41	73,07	72,78	72,64	71,03
Luar Jawa*)	26,59	26,93	27,22	27,36	28,97
Nasional	100	100	100	100	100

Keterangan : *)Termasuk Sumatera.

Sumber : BPS dan Kementerian Perindustrian RI Jakarta.

Sejak tahun 2010-2013 pertumbuhan industri manufaktur Pulau Sumatera menunjukkan peningkatan. Namun sejak 2014 pertumbuhannya menurun. Tahun 2015 industri manufaktur di Sumatera hanya tumbuh 9,04 persen 2014 (Gambar 3). Hal ini juga berpengaruh terhadap total PDB Pulau Sumatera. Bandingkan dengan fenomena di tahun 2012 di mana pada saat industri manufaktur tumbuh tinggi 17,25 persen namun PDB Sumatera justru turun dan hanya tumbuh 11,95 persen (Gambar 3).

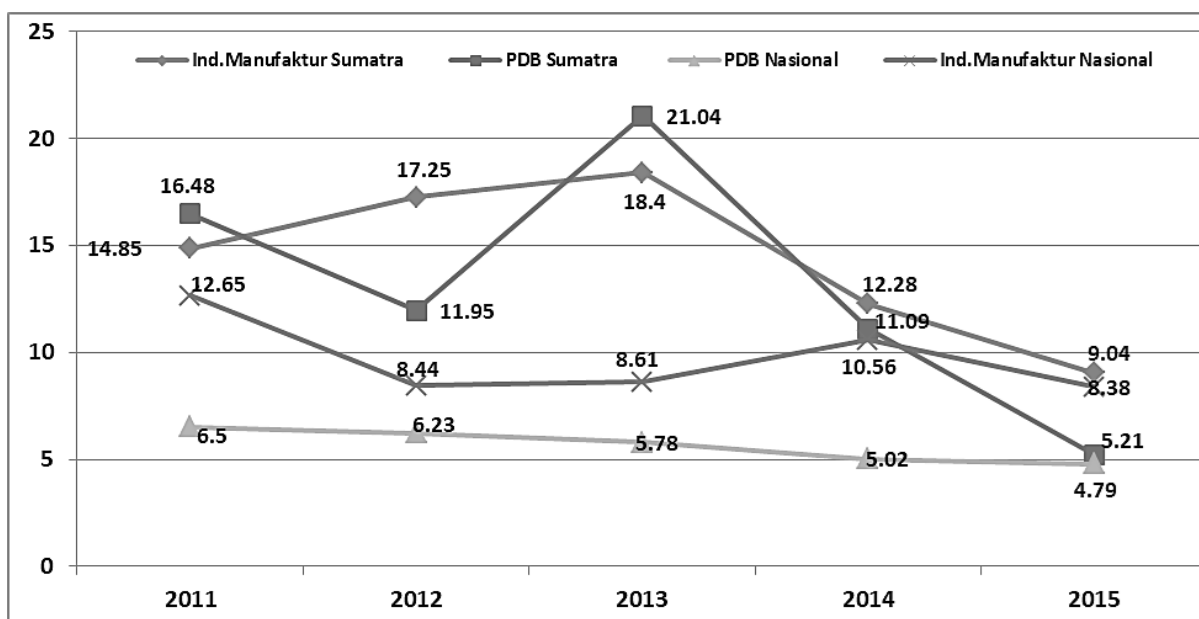
Fenomena ini disebabkan pertumbuhan di luar industri manufaktur melambat. Tetapi tahun 2013 industri manufaktur dan PDB Pulau Sumatera kembali tumbuh positif dan pertumbuhannya meningkat. Hal ini menunjukkan suatu fenomena yang baik dan simetris. Artinya pertumbuhan industri manufaktur tahun 2013 berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB Pulau Sumatera yang juga positif. Sebagian besar industri manufaktur di Sumatera

berbasis perkebunan (*agroindustry*), migas, dan sebagian nonmigas (*mining industry*) yang sangat ditentukan dan juga dipengaruhi perkembangan harga komoditas di pasar internasional. Pada 2014-2015 industri manufaktur dan PDB Pulau Sumatera menunjukkan fenomena yang simetris di mana pertumbuhannya sama-sama menurun dan namun cenderung tidak positif (Gambar 3).

Industri hulu sawit dengan produk *crude palm oil* di Provinsi Sumatera Utara dan juga Riau merupakan salah satu barometer industri sawit terpadu dan bertaraf internasional (*north Sumatera palm oil valley*) di Pulau Sumatera dan Indonesia. Tetapi industri hulu dan hilir di Provinsi Sumatera Utara perlu diintegrasikan dalam suatu kawasan bisnis sawit yang terintegrasi guna menghasilkan berbagai produk turunan dari minyak sawit mentah untuk pasar domestik dan internasional (Kartika,A.,2010).

Secara keseluruhan industri manufaktur di Pulau Sumatera sejak 2011-2015 tumbuh positif yang sebagian besar disumbang oleh 5 provinsi di atas. Namun dalam konteks nasional *share* dari Pulau Sumatera masih relatif kecil dibandingkan *share* dari Pulau Jawa (Gambar 3). Hal ini menjadi permasalahan dan tantangan terutama bagi pemerintah daerah di Pulau Sumatera ke depan. Penurunan pertumbuhan tersebut tidak berarti terjadi de-industrialisasi di Pulau Sumatera. Untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur ke depan maka investasi harus ditingkatkan.

Perbaikan struktur industri manufaktur juga harus melalui strategi diversifikasi industri dengan meningkatkan daya saing terutama memasuki pasar regional seperti ASEAN dalam Masyarakat



Sumber: Diolah dari BPS Jakarta.

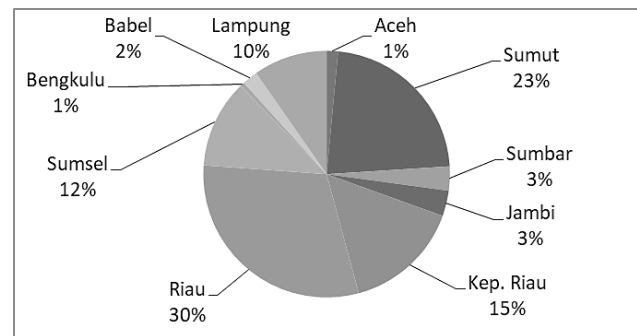
Gambar 3. Pertumbuhan Industri Manufaktur di Pulau Sumatera, Industri Manufaktur Nasional, PDB Pulau Sumatera, dan PDB Nasional (atas dasar harga berlaku) 2011-2015, (%)

Ekonomi ASEAN dan pasar global. Industri minyak sawit swasta dan milik negara di Pulau Sumatera menjadi andalan utama pertumbuhan PDB Pulau Sumatera. Tentu industri minyak sawit ini adalah hanya sebagian dari industri manufaktur di Pulau Sumatera. Perlu pengembangan industri lain di luar basis perkebunan dan migas. Diversifikasi industri manufaktur justru akan memperkuat struktur industri Pulau Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan. Kelemahan selama ini adalah soal daya saing dan struktur industrinya masih mengandalkan komoditas perkebunan dan migas.

Secara rata-rata pertumbuhan industri manufaktur di Pulau Sumatera periode 2011-2015 mencapai 14,12 persen per tahun. Sedangkan industri manufaktur nasional rata-rata tumbuh 9,73 persen per tahun jauh di bawah pertumbuhan Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur Pulau Sumatera diperhitungkan terhadap industri manufaktur nasional terutama didukung oleh industri agro dan industri migas (Gambar 3). Dari Gambar 3 di atas juga dapat dilihat PDB Pulau Sumatera juga tumbuh jauh di atas PDB Nasional (2011-2015). Namun *share* industri manufaktur luar Pulau Jawa rata-rata masih di bawah angka 30 persen terhadap PDB Nasional (Tabel 1). Hal ini disebabkan perkembangan industri manufaktur di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan provinsi lain belum signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Di sisi lain, walaupun nilai LQ industri manufaktur Pulau Sumatera masih rendah di bawah 1, tetapi sejak 2013-2015 nilai LQ-nya meningkat mendekati 1. Nilai $LQ \geq 1$ menggambarkan industri tersebut berdaya saing tinggi dan mampu melakukan *supply* ke pasar di luar pasar Pulau Sumatera dan pasar ekspor. Target pertumbuhan industri manufaktur dapat dicapai lebih optimal apabila para pelaku industri

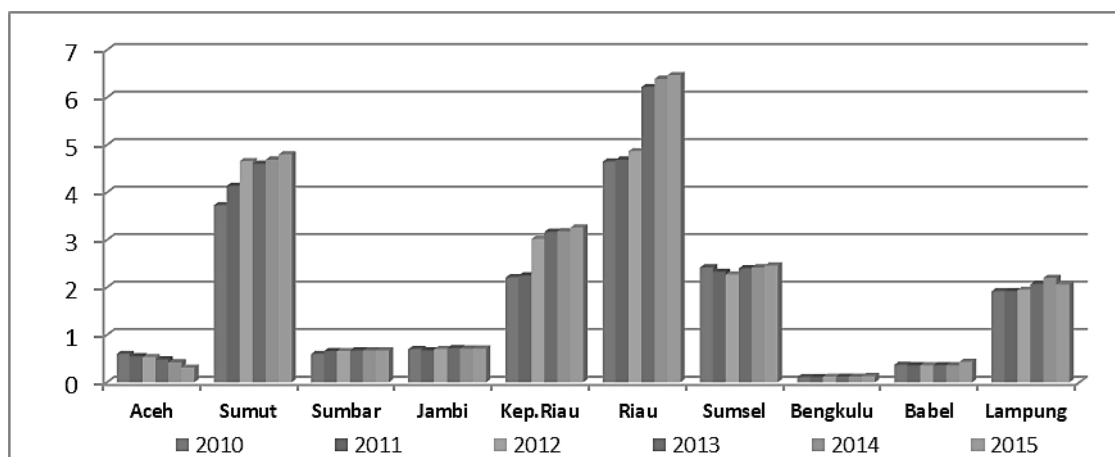
manufaktur mengimplementasikan teknologi yang andal dan menerapkan teknologi inovasi untuk meningkatkan kapasitas produksi yang berkualitas kelas dunia (MM Industri, 2017).



Sumber: Diolah dari BPS Jakarta.

Gambar 4. Kontribusi Industri Manufaktur per Provinsi Terhadap Industri Sumatera 2015, (%)

Gambar 4 menjelaskan bahwa kontribusi setiap provinsi di Pulau Sumatera terhadap industri manufaktur nasional yakni yang terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung di atas 1 persen. Bahkan Provinsi Riau dapat berkontribusi di atas 6 persen mendekati 7 persen. Industri migas dan industri agro merupakan industri utama di Riau sejak beberapa dekade. Apabila melihat perkembangan perekonomian Provinsi Riau sepuluh tahun terakhir seharusnya industri manufaktur Riau bisa berkontribusi 8-10 persen terhadap industri nasional. Walau demikian kontribusinya setiap tahun meningkat mendekati 7 persen. Artinya potensi industri manufaktur Provinsi Riau cukup diperhitungkan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan industri manufaktur terutama nonmigas harus tetap fokus pada luar Pulau Jawa agar dapat bertumbuh dan kontribusinya meningkat pada perekonomian nasional.



Sumber: Diolah dari BPS Jakarta.

Gambar 5. Kontribusi Industri Manufaktur per Provinsi di Sumatera Terhadap Industri Manufaktur Nasional (2010-2015) Dalam %

Sebaliknya sulit mengharapkan kemajuan industri manufaktur di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Bengkulu merupakan provinsi di Sumatera yang terbelakang dalam industri manufaktur sesuai data sampai tahun 2015. Bahkan Aceh dengan *share* yang menurun (Gambar 5). Industri pupuk Iskandar Muda Aceh sampai saat ini masih berjalan di tempat bila dibandingkan dengan industri pupuk (Pupuk Sriwijaya) di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan industri migas Provinsi Aceh turun drastis karena tidak ada penemuan cadangan minyak mentah baru dan cadangan gas bumi telah habis dieksploitasi dan belum ada penemuan cadangan terbukti yang signifikan.²

Sementara industri semen dan batu bara di Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan produksinya agar *share*-nya terhadap industri manufaktur nasional bisa bertambah di masa datang. Provinsi Jambi saat ini sedang mengembangkan industri berbasis perkebunan (sawit dan karet) seperti yang berhasil dikembangkan di Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Di samping itu, cadangan migas di Provinsi Jambi masih berpotensi sebagai cadangan migas terbukti bila dilakukan eksplorasi yang intensif sebagaimana eksplorasi migas yang sedang dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi (PT.Pertamina, 2017). Untuk meningkatkan kinerja industri manufaktur di Pulau Sumatera, dukungan kebijakan pemerintah di sektor industri sangat penting. Bahkan pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan industri nasional terutama untuk jangka menengah ke depan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Sejalan dengan Gambar 3 di atas, industri manufaktur Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik. Berdasarkan laporan statistik berjudul "*International Yearbook of Industrial Statistics 2016*", industri manufaktur di Indonesia dilaporkan memberikan kontribusi hampir seperempat dari PDB nasional. Direktur Jenderal Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) mengakui Indonesia sebagai negara urutan ke-10 dunia di sektor industri manufaktur (BKPM, 2017). Namun menurut data UNIDO indeks daya saing industri di Indonesia masih rendah. *Competitive Industry Performance Index* Indonesia tahun 2012 adalah 0,09 dengan ranking ke-40 di dunia (UNIDO, 2017).

Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) tahun 2015, indeks daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-37 dari 140

negara. Sedangkan, di tingkat negara ASEAN, posisi indeks daya saing Indonesia berada di bawah negara Singapura, Malaysia dan Thailand (Kemenperin, 2017).

Berdasarkan data BPS, secara kumulatif tahun 2016 industri manufaktur nasional tumbuh 4 persen dengan pertumbuhan positif tertinggi secara berturut-turut adalah industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional (8,01 persen); industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki (7,62 persen); dan industri makanan dan minuman (6,26 persen). Sedangkan industri yang tumbuh negatif 2016 adalah industri karet, barang dari karet, dan plastik (-8,39 persen), dan beberapa jenis industri lainnya (economy.okezone.com,2017).

Struktur industri manufaktur ditentukan oleh industri yang memiliki daya saing dan efisien. Industri yang efisien dan memiliki daya saing pasti akan tumbuh positif karena tidak hanya pasar domestik yang menyerap tetapi juga pasar internasional. Tidak banyaknya industri manufaktur tumbuh positif juga disebabkan kerentanan terhadap gejolak pasar internasional bila terjadi krisis global. Perlu pendalaman struktur industri sehingga akan mencegah terjadinya de-industrialisasi.

Saat ini, industri manufaktur Indonesia umumnya didominasi industri yang berorientasi pasar domestik dengan tingkat kandungan impor yang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kebijakan investasi dan kurangnya koneksi pada pasar global. Indonesia mempunyai potensi yang jauh melebihi kinerja saat ini seperti SDA yang melimpah, mengalami bonus demografi dengan jumlah usia kerja yang relatif meningkat, dan mempunyai letak geografis yang strategis. Selain itu, Indonesia juga dapat mengoptimalkan momentum "*the rise of Asia*" untuk ikut mengembangkan ekonominya. Dalam mengatasi berbagai permasalahan di atas dan untuk mengoptimalkan potensi, transformasi ekonomi perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing industri manufaktur di pasar global. Industri manufaktur menjadi sentral dalam transformasi ekonomi karena industri merupakan lokomotif pertumbuhan menuju negara maju. Penyerapan banyak tenaga kerja di sektor industri dapat menciptakan nilai tambah dalam perekonomian yang pada akhirnya dapat menjadi sumber devisa secara fundamental (Ridhwan,MM.,dkk, 2015).

Dalam mengembangkan industri manufaktur di luar Pulau Jawa, pemerintah harus memerhatikan banyak hal seperti infrastruktur jalan, listrik, air, dan jalur logistik seperti pelabuhan. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menyiapkan tenaga kerja yang baik dan berkualitas di daerah agar dapat diserap oleh industri manufaktur. Beberapa faktor

² Aceh pernah menjadi daerah penghasil gas bumi terbesar di Indonesia, terutama *Liquidified Natural Gas (LNG)*.

penyebab lambatnya pengembangan industri di luar Pulau Jawa yakni masalah pembebasan lahan yang lama dan minimnya infrastruktur di kawasan industri yang akan dibangun (Detik.com, 2017).

Di samping itu strategi pengembangan industri manufaktur ke depan dapat dilakukan dengan dua strategi yakni *pertama*, industri yang bersifat *eksplosive* dan *kedua*, industri *implosive*. Sebelum suatu cabang industri menghasilkan suatu produk akhir untuk cabang industri tersebut maka diperlukan berlangsungnya berbagai macam proses produksi. Proses produksi tersebut dapat bersifat *explosive* yang mengandung arti bahwa berbagai proses produksi berlangsung secara sejajar dan tiap-tiap proses menggunakan satu jenis masukan antara dan melangsungkan bermacam-macam transformasi bentuk yang menghasilkan berbagai jenis produk. Misalnya industri petrokimia menggunakan satu jenis masukan (*input*) antara sebagai *feedstock*, tetapi menghasilkan berbagai macam bahan-bahan kimia (*output*) sebagai produk akhirnya.

Di lain pihak, proses produksi industri manufaktur juga dapat bersifat *implosive* yang artinya berbagai macam masukan antara dikombinasikan untuk menghasilkan satu jenis produk misalnya produk televisi. Kalau proses *explosive* memerlukan cabang-cabang industri dasar, maka proses produksi dalam industri yang bersifat *implosive* dapat diterapkan pada tahap-tahap paling akhir dari mata rantai produksi dan tidak memerlukan kedalaman struktur industri seperti industri-industri perakitan (*assembling*) yang dapat berkembang walaupun tidak ada satu macam komponen yang dibuat atau diproduksi di dalam negeri (Rowland B. Pasaribu, 2017).

Di samping dua strategi di atas, ada dua macam pola strategi yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses industrialisasi di Indonesia yang juga umum dilaksanakan di negara berkembang, yaitu: *pertama*, strategi Industri Substitusi Impor (*import substitution industry*) yang sering disebut dengan istilah *inward-looking strategy* atau "orientasi ke dalam". *Kedua*, strategi industri berorientasi ekspor (*export oriented industry*) yang sering disebut dengan istilah *outward looking strategy*. Strategi pengembangan industri substitusi impor adalah lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pasar domestik untuk mengurangi impor berbagai barang kebutuhan di pasar domestik terutama barang konsumsi. Strategi substitusi impor dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi (PDB) yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri-industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor.

Sedangkan strategi orientasi ekspor ke pasar internasional didasari oleh pemikiran bahwa laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat industri di dalam negeri dijual di pasar ekspor. Baik strategi substitusi impor dan industri yang berorientasi ekspor tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif seperti insentif fiskal dan kemudahan lainnya dari pemerintah.

Kedua jenis strategi pengembangan industri di atas dapat diterapkan di seluruh Indonesia termasuk dalam mengembangkan industri manufaktur di Pulau Sumatera dengan tetap memerhatikan potensi sumber daya yang dimiliki daerah agar tercapai efisiensi dan daya saing industri yang tinggi. Dan saat ini, walaupun sebagian besar industri di Indonesia sudah berorientasi pasar ekspor, tetapi industri substitusi impor juga penting karena adanya peningkatan permintaan barang konsumsi di dalam negeri yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa serta pendapatan perkapita yang cenderung meningkat.

Pandangan lain tentang strategi industrialisasi di Indonesia adalah dengan melihat karakteristik potensi sektor basis yang dimiliki yakni sektor pertanian. Dengan faktor *endowment* di sektor pertanian, maka seharusnya strategi industrialisasi distimulus dan didasarkan pada sektor pertanian sehingga tidak akan mengganggu kondisi ketenagakerjaan. Jika model industri berbasis pertanian ditempuh dan diterapkan di Pulau Sumatera, maka dua hal penting segera akan dicapai yakni; *pertama*, akan terjadi tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai, dan *kedua*, jumlah tenaga kerja yang dapat terlibat dalam proses industrialisasi sangat banyak.

Berdasarkan pandangan ini maka paling tidak transformasi ekonomi Pulau Sumatera bisa dikarakteristikan dalam dua hal yaitu: *pertama*, sektor pertanian harus terus mengalami dinamika internal berupa produktivitas pertanian yang terus meningkat dan menjadi basis bagi industri manufaktur yang akan dikembangkan. *Kedua*, sektor industri yang dikembangkan mempunyai saling keterkaitan dengan sektor pertanian, di mana keterkaitan industri dan pertanian yang didinamisasikan secara luar biasa merupakan kunci bagi pertumbuhan industri manufaktur. Dalam model konvensional karakteristik industrialisasi biasanya diukur dengan lima indikator utama: *pertama*, pertumbuhan ekonomi (PDB) meningkat melebihi pertumbuhan penduduk. *Kedua*, kontribusi sektor primer menurun. *Ketiga*, kontribusi sektor sekunder meningkat. *Keempat*, kontribusi sektor jasa lebih kurang konstan sehingga sebuah negara akan menjadi negara industri baru. *Kelima*, konsumsi komoditas pangan menurun dan komoditas industri meningkat. Implikasinya adalah di sisi produksi peran sektor primer berkurang diganti dengan

meningkatnya produksi sektor sekunder dalam hal ini adalah sektor industri manufaktur (Hakim, M.A.,2009).

Apabila melihat sejarah industrialisasi di Indonesia, sejak awal pemerintahan orde baru terdapat tiga pemikiran strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia, di mana ketiganya pernah dilaksanakan secara tersendiri ataupun bersama-sama, yaitu: pertama, strategi industrialisasi yang mengembangkan industri-industri yang berspektrum luas (*broad-based industry*); kedua, strategi industrialisasi yang mengutamakan industri-industri berteknologi canggih berbasis impor seperti industri pesawat terbang/dirgantara dan industri telekomunikasi; ketiga, strategi industri pengolahan hasil pertanian berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan pembangunan pertanian (Damayanthi,V.R.,2008:79).

Sebagaimana disebutkan di atas kinerja industri manufaktur Pulau Sumatera secara keseluruhan mengalami pertumbuhan positif terutama di lima provinsi selama periode 2010-2015. Hal ini tidak terlepas dari strategi dan kebijakan industri secara nasional. Pertumbuhan industri manufaktur di Pulau Sumatera juga tidak terlepas dari kemajuan industri manufaktur di Pulau Jawa. Namun peningkatan kinerja industri manufaktur di Pulau Sumatera tidak bisa mengabaikan faktor sumber daya yang dimiliki masing-masing provinsi yang sebagian besar berbasis pertanian dan SDA. Dari sini dapat dilihat bahwa industri berbasis pertanian dan SDA bukannya tidak bisa berkembang tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global karena sebagian besar produknya dipasarkan ke pasar internasional yang dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas tersebut di pasar internasional.

Banyak pilihan strategi industrialisasi yang dapat dipilih tetapi pilihan strategi industri substitusi impor juga tidaklah salah karena akan mengurangi impor barang konsumsi yang sudah dapat diproduksi oleh industri manufaktur dalam negeri. Industri manufaktur yang berorientasi ekspor sebaiknya difokuskan pada industri yang berdaya saing tinggi yang juga dapat dikembangkan di Sumatera tentu dengan meningkatkan efisiensi produksi, mata rantai pasokan (logistik), dan indeks daya saing dari industri tersebut.

SIMPULAN

Perkembangan industri manufaktur nasional dalam beberapa tahun terakhir tumbuh positif. Kontribusi terbesar adalah Pulau Jawa dan disusul oleh Pulau Sumatera dan pulau lainnya. Pengembangan industri manufaktur di Pulau Sumatera berbasis sumber daya alam adalah tepat karena sesuai dengan faktor *endowment* yang dimiliki oleh Pulau Sumatera.

Walaupun nilai *Location Quotient* industri manufaktur provinsi di Pulau Sumatera berada di bawah angka 1, tetapi di beberapa provinsi seperti di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Riau industri manufakturnya mengalami perkembangan yang cepat dengan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan industri manufaktur nasional. Kontribusi industri manufaktur di ketiga provinsi tersebut juga relatif besar dan penting terhadap pertumbuhan PDB Pulau Sumatera. Dengan kata lain industri manufaktur di ketiga provinsi tersebut memberikan kontribusi sangat penting dalam perekonomian di masing-masing provinsi.

Dalam upaya mengembangkan industri manufaktur di Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat, maka hendaknya didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing. Industri manufaktur di kelima provinsi ini belum dapat diandalkan dalam mendukung perekonomian. Dalam kaitan ini, kebijakan industri nasional yang sudah ditetapkan pemerintah hendaknya mampu diimplementasikan guna merestrukturisasi industri manufaktur di 5 (lima) provinsi tersebut, di samping meningkatkan daya saing dan kinerja industri di tiga provinsi yang sudah berkembang. Secara keseluruhan perkembangan industri manufaktur Pulau Sumatera cukup penting dalam memberikan kontribusi terhadap industri nasional dan PDB, walaupun kinerjanya masih menempati posisi kedua setelah kinerja industri manufaktur di Pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah/Majalah Ilmiah

- Damayanthi, V. R. (2008). Proses industrialisasi di Indonesia dalam prespektif ekonomi politik. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 2 No. 1 Mei 2008, Jawa Timur: Universitas Brawijaya, hlm.79.
- Kartika, A. (2010). Sumatera Utara sebagai barometer industri perkebunan berbasis Kelapa Sawit. *Jurnal Keuangan & Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Sumatera Utara: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Harapan, hlm.5.
- Trianto, A. (2017). Analisis daya saing ekspor komoditi unggulan non-migas di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Derivatif*, Lampung: FE Universitas Muhammadiyah Metro, diunduh 10 Februari 2017, dari <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/9/8>, hlm. 2.

- Kustanto, H., dkk. (2012). Reindustrialisasi dan dampaknya terhadap ekonomi makro serta kinerja sektor industri di Indonesia. *Jurnal Riset Industri*, Vol. VI, No. 1, Th.2012, Jakarta: Kementerian Perindustrian RI, hlm.105.
- Hakim, M.A. (2009). Industrialisasi di Indonesia: Menuju kemitraan yang islami. *Jurnal Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2009, Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, hlm.111.
- Murtianingsih. (2015). Globalisasi dan korelasinya dengan industri manufaktur yang merupakan leading sektor perekonomian. *Jurnal JIBEKA* Volume 9, Nomor 2, Agustus 2015, Jawa Timur: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Asia Malang, hlm. 34.
- Saimul, dkk. (2011). Analisis pengaruh ekspor industri manufaktur pada kinerja makro-ekonomi Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 7, Nomor 2, September 2011, Jakarta: Universitas Terbuka, hlm.75,
- Yanfitri, Y.K. (2010). Dinamika industri manufaktur dan respon terhadap siklus bisnis. *Bulletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Oktober 2010, Jakarta: Bank Indonesia, hlm.149.
- Sumber Digital**
- BKPM. (2017). Unindo Indonesia masuk 10 besar negara industri manufaktur. Diperoleh 1 Februari 2017, dari <http://www.bkpm.go.id>.
- BPS. (2015). Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015. Diperoleh 24 Januari 2017, dari www.bps.go.id.
- Bisnisaceh. (2017). Ekspor sebagai penopang perekonomian Aceh. Diperoleh 2 Februari 2017, dalam <http://www.bisnisaceh.com/>.
- Detikcom. (2017). Bangun 14 kawasan industri di luar Jawa, ini tantangan pemerintah. Diperoleh 5 Mei 2017, dari <https://finance.detik.com/industri>.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau. (2017). Industri manufaktur. Diperoleh 8 Februari 2017, dari <http://sddkd.riau.go.id/>.
- Habadaily. (2017). Aceh butuh industri pengolahan ikan. Diperoleh tanggal 2 Februari 2017, dari <http://habadaily.com/ekbis/>.
- Katadata. (2017). Industri manufaktur hadapi masalah. Diperoleh 6 Februari 2017, dari <http://katadata.co.id/berita/>.
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Kebijakan industri nasional tahun 2015-2019. Diperoleh 10 Februari 2017, dari www.kemenperin.go.id.
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Kawasan industri. Diperoleh 10 Februari 2017, dari www.kemenperin.go.id.
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Kinerja industri manufaktur tahun 2015. Diperoleh 5 Februari 2017, dari www.kemenperin.go.id.
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Menperin: Sektor industri pengolahan sumbang 19,9% PDB. diperoleh 1 Februari 2017, dari <http://economy.okezone.com/read/>.
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Menperin: Kawasan industri wujudkan pemerataan ekonomi. Diperoleh 14 Februari 2017, dari www.kemenperin.go.id.
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Pertumbuhan industri manufaktur Sumbar 2016 lampau nasional. diperoleh 8 Februari 2017, dari <http://www.antarasumbar.com/berita>.
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Pertumbuhan industri manufaktur melambat. Diperoleh 9 Februari 2017, dari <http://economy.okezone.com/read/>,
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Rencana kerja Kementerian Perindustrian RI. Diperoleh 10 Februari 2017, dari www.kemenperin.go.id.
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Setahun pemerintahan Jokowi-JK: Sektor industri menjadi motor penggerak ekonomi nasional. diperoleh 1 Februari 2017, dari <http://kemenperin.go.id/artikel/>.
- Kementerian Perindustrian RI. (2017). Tingkatkan daya saing indonesia, kemenperin genjot peran litbang industri. Diperoleh 10 Februari 2017, dari www.kemenperin.go.id.
- Ma'ruf, A. (2012). Anatomi makro ekonomi regional: Studi kasus Provinsi DIY, Artikel, Penerbit FE-Universitas Negeri Semarang (Unnes). diperoleh 2 Februari 2017, dari <http://ep.unnes.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/03-Artikel-Maruf-09-Rev13.pdf>.
- Pasaribu, R. B. (2017). Industri dan industrialisasi. diperoleh 16 Februari 2017, dari http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35482/industri-dan-industrialisasi.

- PT. Pertamina. (2017). Pertamina EP berhasil temukan cadangan migas di Jambi. diperoleh 2 Februari 2017, dari <http://www.migasreview.com/post>.
- Tempo. (2017). Pertumbuhan industri. diperoleh 5 Mei 2017, dari <https://www.tempo.co/topik/masalah/2537/pertumbuhan-industri>.
- Trianto, A. (2017). Analisis daya saing ekspor komoditi unggulan non-migas di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Derivatif*, Penerbit FE Universitas Muhammadiyah Metro, Kota Metro Lampung. diperoleh 10 Februari 2017, dari <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/9/8>, hlm. 2.
- US Bureau of Economics Analysis. (2017). Location quotient analysis. Diperoleh 20 Februari 2017, dari <https://www.bea.gov/faq/index.cfm>.
- UNIDO. (2017). Competitive industrial performance report 2014. Diperoleh 10 Februari 2017, <http://www.unido.org/>.

Sumber Lain

- Amin, A. A. (2015). Peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. *Skripsi*, Penerbit Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara.
- Savitri, D. (2008). Analisis identifikasi sektor unggulan dan struktur ekonomi Pulau Sumatera. *Skripsi*, Penerbit Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB hlm.15-16.
- Masagus M. Ridhwan, dkk. (2015). Analisis daya saing dan strategi industri nasional di era masyarakat ekonomi ASEAN dan perdagangan bebas. *Working Paper*, WP/3/2015, hlm.3-4. Penerbit Bank Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.